

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu daerah selalu ditujukan demi meningkatkannya kualitas kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah berbagai usaha dimana ditujukan guna menambah kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meminimalisir ketimpangan pendapatan di masyarakat. Tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara salah satunya bisa dari pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan ekonomi dalam negara dikatakan tumbuh apabila telah tercapainya tingkat kegiatan ekonomi sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi bisa memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui jalur ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan juga dapat menjelaskan keadaan perekonomian dan sosial termasuk juga tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

Indonesia salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu tingkat pengangguran masih tinggi dan pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Cara yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah dengan perluasan penyerapan tenaga kerja, dimana akan berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat jika jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan berkualitas dan memadai sehingga bisa menyerap peningkatan pertumbuhan angkatan tenaga kerja setiap tahunnya. Ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja baru bisa mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dimana nantinya akan membuat pemborosan sumber daya dan berpeluang

meningkatnya beban masyarakat, sehingga menjadi penyebab kemiskinan dan dapat menghambat pembangunan perekonomian dalam jangka panjang. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah bias dilihat dari penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja suatu daerah maka tingkat produktivitas juga akan tinggi karena tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor produksi lainnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebesar 39.698.631 jiwa dengan total angkatan kerja sebesar 21,59 juta jiwa, naik 584 ribu jiwa dibanding tahun 2018 dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat 1,31 poin. Jumlah pengangguran tahun 2019 bertambah 16,82 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,83%. Dilihat dari tabel dibawah ini TPT di Jawa Timur cenderung menurun setiap tahunnya, namun jumlah pengangguran yang masih lebih dari 800 ribu orang menunjukkan bahwa tenaga kerja di Jawa Timur masih belum terserap dengan maksimal.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran, Total Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2011-2019

Tahun	Penduduk Bekerja	Pengangguran	Total Angkatan Kerja	TPT
2011	18.604.866	1.047.696	19.652.562	5,33 %
2012	19.411.256	826.798	20.238.054	4,09 %
2013	19.553.910	878.543	20.432.453	4,30 %
2014	19.306.508	843.490	20.149.998	4,19 %
2015	19.367.777	906.904	20.274.681	4,47 %
2016	19.114.563	839.283	19.953.846	4,21 %
2017	20.099.220	838.496	20.937.716	4,00 %
2018	20.449.949	850.474	21.300.432	3,99 %
2019	20.655.632	843.754	21.499.386	3,92 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan perkembangan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2019. Dari data diatas, tahun 2012 total

penduduk bekerja mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011. Tahun 2012 -2016 lebih dari 19 juta jiwa. Mulai tahun 2017 jumlah penduduk bekerja sudah lebih dari 20 juta jiwa. Tahun 2011 menjadi jumlah pengangguran terbesar disbanding 8 tahun sesudahnya, tahun 2015 angka pengangguran mencapai 900 ribu jiwa namun 2016-2019 jumlah pengangguran berada pada lebih dari 800ribu jiwa. Total angkatan kerja terus mengalami fluktuasi tahun 2011 dan 2016 totalnya 19 juta lebih. Tahun 2012-2015 berada pada angka lebih dari 20 juta jiwa dan 2 tahun terakhir berdasarkan tabel lebih dari 21 juta jiwa Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut mengindikasikan bahwa penawaran tenaga kerja di pasar mengalami peningkatan walaupun tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerapan tenaga kerja.

Pasar tenaga kerja sama dengan pasar pada umumnya, dimana di perekonomiannya dipengaruhi dari besarnya penawaran juga permintaan, tetapi dalam pasar tenaga kerja tidak sama disebabkan oleh permintaan tenaga kerja dimana menggambarkan permintaan turunan (*deried demand*) sehingga berbeda.² Kondisi pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia selalu terjadi perubahan, termasuk juga pada kawasan elit di Jawa Timur yaitu Gerbangkertasusila yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan.

Kawasan Gerbangkertasusila merupakan kawasan metropolitan di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya dimana kawasan ini merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Kawasan Gerbangkertasusila terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Pembentukan Suatu Wilayah Pembangunan (SWP)

² Rini Sulistyawati, Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, *Jurnal EKSOS*, Vol.8, No.3, 2012, hal. 196

Gerbangketasusila sendiri menurut Perda Provinsi Jawa Timur No.2/1996 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Dan PP No.47/1996 Tentang RTRW Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah.³ Melalui pemerataan pembangunan ekonomi pada dasarnya akan mengurangi tingkat kesenjangan atau ketimpangan di suatu daerah. Dalam suatu daerah tentu memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, semakain besar umlah penduduknya maka semakin besar pula jumlah angkatan kerjanya, seperti dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Angkatan Kerja di Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2011-2019 (jiwa)

TAHUN	KOTA/KABUPATEN						
	KAB. GRESIK	KAB. BANG KALAN	KAB. MOJO KERTO	KOTA MOJO KERTO	KOTA SURA BAYA	KAB. SIDO ARJO	KAB. LAMO NGAN
2011	569.098	444.868	524.426	63.863	1.334.419	1.048.577	580.256
2012	571.038	468.379	557.832	66.399	1.437.448	1.012.290	621.617
2013	619.688	474.876	545.669	65.898	1.483.343	1.039.833	644.188
2014	592.569	473.411	553.405	64.630	1.465.502	1.069.708	611.621
2015	611.721	481.352	575.330	67.079	1.468.094	1.083.519	633.048
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	662.618	482.634	620.659	67.235	1.495.847	1.075.359	638.330
2018	664.532	494.269	616.733	68.512	1.520.041	1.094.650	634.845
2019	657.273	458.312	601.378	64.806	1.566.846	1.153.529	645.257

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir disetiap tahun mulai 2011 sampai 2019 di kawasan Gerbangkertasusila mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Di Kabupaten Gresik jumlah angkatan kerja tahun 2011-2013 terus meningkat, tahun 2014 sedikit menurun namun tahun-

³ Rizky Mahardika, *Analisis Spasial Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbangkertasusila*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019, hal.7

tahun berikutnya kembali bertambah. Kabupaten Bangkalan terus meningkat namun tahun 2019 mengalami penurunan jumlah angkatan kerja, begitu juga pada Kabupaten dan Kota Mojokerto tahun 2019 mengalami penurunan jumlah angkatan kerja, Kota Surabaya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun selalu berkisar pada 1,5 juta, pada Kabupaten Sidoarjo jumlah angkatan kerja berkisar pada 1,1 juta jiwa, pada tahun 2011-2013 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lamongan meningkat, sedikit turun tahun 2014 namun tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja.

Dalam suatu daerah jumlah penyerapan tenaga kerja berbeda-beda, semakin maju suatu daerah tentu permintaan konsumen akan produk tinggi maka serapan dalam tenaga kerja juga akan semakin besar guna memenuhi permintaan konsumen. Jumlah permintaan dalam tenaga kerja akan mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau terserap oleh pasar kerja.⁴ Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase dari jumlah total pengangguran. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja dimana sama sekali tidak memiliki pekerjaan namun sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka terdiri dari (1) mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3) mereka yang tidak punya pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.⁵ Berikut ini merupakan tabel data tentang TPT di Kawasan Gerbangkertasusila tahun 2015-2019.

⁴ Berita Resmi Statistik, *Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2019*, No. 41/05/Th. XXII, hal. 3, diakses pada 6 Mei 2019

⁵ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hal.3

Tabel 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Gerbangkertasusila
Tahun 2011-2019 (persen)

TAHUN	KOTA/KABUPATEN						
	KAB. GRE SIK	KAB. BANG KALAN	KAB. MOJO KERTO	KOTA MOJO KERTO	KOTA SURABAYA	KAB. SIDO ARJO	KAB. LAMONGAN
2011	5,93	6,37	6,79	10,59	7,81	8,65	6,14
2012	6,78	5,13	3,35	7,52	5,27	5,37	4,75
2013	4,55	6,78	3,16	5,73	5,32	4,12	4,93
2014	5,06	5,68	3,81	4,42	5,82	3,88	4,3
2015	5,67	5	4,05	4,88	7,01	6,3	4,1
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	5,54	4,48	5	3,61	5,98	4,97	4,12
2018	4,54	4,48	5	2,45	5,98	4,97	4,12
2019	5,54	5,84	3,68	2,65	5,87	4,72	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, TPT kawasan Gerbangkertasusila setiap daerahnya mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Tercatat bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi semilam tahun terakhir berada di Kota Mojokerto tahun 2011 sebesar 10,59% namun Kota Mojokerto hamper setiap tahun TPTnya turun, Kabupaten lain yang TPTnya turun tiap tahunnya adalah Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik TPT tertinggi tahun 2012 dan TPT terendah tahun 2018. TPT tertinggi Kabupaten Bangkalan tahun 2013 sebesar 6,78% dan Kabupaten Mojokerto tahun 2011 sebesar 6,79%. TPT terendah Kota Surabaya berada tahun 2013 sebesar 5,27% Kabupaten Sidoarjo terendah tahun 2014 sebesar 3,88%.

Masalah tentang ketenagakerjaan merupakan masalah yang luas dan kompleks, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mengatasinya. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang berpengaruh pada permintaan hasil. Upah merupakan hasil dari pekerja setelah atau akan melakukan pekerjaan. Upah bias menjadi salah satu motivasi para pekerja untuk meningkatkan

kesejahteraan hidupnya. Guna melindungi hak-hak pekerja maka pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berupa kebutuhan akan pangan.⁶ Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli dimana akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun bagi pengusaha yang memasukkan upah kedalam biaya, maka kenaikan upah akan menyebabkan penyesuaian tingkat upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah. Bagi pemerintah upah merupakan sarana pemertaan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain upah minimum, PDRB juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi.⁷ Bergesernya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pergeseran perubahan nilai PDRB. Nilai PDRB suatu daerah sama dengan nilai peningkatannya semua sector kegiatan ekonomi atau lapangan usaha dalam wilayah yang sama. Nilai PDRB lebih besar menggambarkan kuatnya kemampuan sumber daya ekonominya, begitu juga sebaliknya. Jika PDRB dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, hubungannya korelasi positif. Peningkatan nilai PDRB akan meningkatkan serapan tenaga kerja. Jika nilai PDRB meningkat maka jumlah output atau penjualan semua unit ekonomi ikut meningkat. Output penjualan perusahaan yang lebih besar ini akan mendorong

⁶ Rini Sulistiawati, Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia, *Jurnal EKSOS*, Vol. 8, No. 3, 2012, hal.197

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2008-2012*, hal.1

perusahaan untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja guna memenuhi peningkatan penjualan.

Peningkatan nilai PDRB menunjukkan pengaruh hubungan dengan peningkatan serapan kerja, selain itu juga faktor inflasi bisa mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga komoditas secara terus menerus dan bersifat umum dimana kenaikan harga komoditas ini akan berpengaruh terhadap harga-harga komoditas lain. Jika terjadi inflasi maka bisa mempengaruhi jalannya produktivitas kegiatan ekonomi. Inflasi menjadi salah satu ancaman bagi produsen, inflasi membuat harga input meningkat dimana akan meningkatkan juga biaya produksi, jika biaya produksi meningkat maka produsen cenderung akan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk berlangsungnya kegiatan produksi, maka akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga inflasi bisa membawa dampak yang kurang baik terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas, mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan aspek-aspek yang bisa berdampak dalam permintaan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila, maka judul penelitiannya adalah **“Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) Tahun 2011-2019”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor upah minimum dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila?
2. Bagaimana pengaruh faktor PDRB dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila?

3. Bagaimana pengaruh faktor inflasi dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila?
4. Bagaimana pengaruh faktor upah minimum, PDRB, dan inflasi dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila?

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah untuk memperjelas ruang lingkupnya. Sehingga terdapat masalah yang bisa diidentifikasi, yaitu:

1. Pertumbuhan tenaga kerja dan permintaan yang tidak seimbang, dimana tenaga kerja pertumbuhannya lebih besar disbanding dengan permintaan tenaga kerja.
2. Masih tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.
3. Peningkatan tingkat upah bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, namun bisa juga mengakibatkan pengurangan terhadap permintaan tenaga kerja.
4. Inflasi menjadi salah satu masalah bagi produsen sebab semakin tinggi tingkat inflasi yang terjadi maka akan meningkatkan biaya input sehingga perlu adanya perencanaan ulang anggaran.

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah upah minimum mempunyai pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila.
2. Untuk menganalisis apakah PDRB mempunyai pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja kawasan Gerbangkertasusila.
3. Untuk menganalisis apakah inflasi mempunyai pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja kawasan Gerbangkertasusila.
4. Untuk menganalisis apakah upah minimum, PDRB, dan inflasi mempunyai pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian di harapkan bisa memperoleh manfaat diantaranya:

1. Bagi mahasiswa nantinya diharapkan bisa sebagai sarana untuk memperoleh informasi, acuan dan referensi sekaligus pengembangan penelitian yang akan datang.
2. Bagi Pihak Akademik nantinya diharapkan bisa menjadi tambahan referensi tentang studi kasus yang bersangkutan dan bisa digunakan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.
3. Bagi Pemerintah Jawa Timur nantinya diharapkan bisa dijadikan tambahan referensi dan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam kebijakan dan pengembangan industri serta upaya strategi pengembangan lainnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

Didalam melaksanakan penelitian ini, untuk menghindari terjadi pelebaran dan penyimpangan, jadi akan diberikan batasan masalah yang jelas, yaitu wilayah penelitian berada di kawasan Gerbangkertasusila, dimana variabel-variabelnya secara teoritis memiliki pengaruh didalam penyerapan tenaga kerja, yaitu variabel upah minimum, PDRB dan inflasi.

Berdasarkan uraian diatas ada batasan masalah yang akan penulis teliti, karena keterbatasan waktu, kemampuan, serta biaya yang dipunyai peneliti. Di dalam penelitian ini nantinya akan dibatasi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan variabel-variabel berdampak dalam penyerapan tenaga kerja seperti upah minimum, PDRB, dan inflasi di kawasan Gerbangkertasusila. Maka inilah menjadi dasar dari penelitian ini.

G. Definisi Operasional

1. Upah merupakan hak yang harus diperoleh pekerja dapat diberikan berupa uang dari pelaku usaha atas jasa atau pekerjaan dari kewajiban yang akan atau sudah dilaksanakan.

2. PDRB merupakan total nilai tambah produk dan pelayanan yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian suatu wilayah pada rentang waktu tertentu.
3. Inflasi merupakan naiknya harga komoditas dari periode sebelumnya secara terus menerus dan bersifat umum yang dapat mempengaruhi stabilitas harga komoditas lain.
4. Tenaga kerja merupakan tiap individu yang bisa melakukan pekerjaan dengan menghasilkan output yang bisa digunakan oleh orang banyak.

H. Sistematika Penelitian

BAB I : Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah. Dengan pendahuluan ini dimaksudnya pembaca bisa mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisikan tentang hal-hal pokok yang bisa dijadikan pijakan pemahaman bab-bab setelahnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan alasan peneliti mengangkat tema dan masalah yang akan diteliti nantinya.

BAB II : Bab ini membahas tentang kumpulan kajian teori yang akan dijadikan alat analisa dalam pembahasan objek penelitian tentang pengaruh upah, PDRB, dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan Gerbangkertasusila tahun 2015-2019. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III : Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian secara maksimal yang memuat jenis penelitian, sampling, teknik analisis data, sumber data dan variabel dalam penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data serta metode penelitian yang digunakan.

- BAB IV : Pada bab hasil penelitian, peneliti memperlihatkan hasil penelitian yang membahas tentang diskripsi objek penelitian, dan temuan hasil penelitian.
- BAB V : Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dengan membandingkan dengan teori maupun studi empiris yang telah dilakukan peneliti lainnya.
- BAB VI : Bab ini penulis memaparkan bagian akhir berupa bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.